



BADAN POM

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

LAPORAN KINERJA 2017

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



SAMBUTAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Terciptanya *good governance* dan *clean government* mendapatkan tempat yang sangat strategis dan berimplikasi pada seluruh unit dan warga organisasi termasuk Biro Perencanaan dan Keuangan, BPOM. Dalam rangka turut serta menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkungan BPOM tersebut, maka Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Laporan Kinerja tahun 2017. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada organisasi, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Sebagai unit yang mengkoordinasi dan memfasilitasi proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, Biro Perencanaan dan Keuangan berupaya meletakkan dasar-dasar dan melaksanakan proses tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh suprasistem.

Perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir akan memudahkan proses pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan evaluasinya sebagai suatu mata rantai yang saling terkait. Transparansi dan akuntabilitas merupakan titik tolak dan fokus terciptanya *good governance* dan *clean government*. Karena itu, selain mengkoordinasi dan memfasilitasi proses perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan juga menyusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan yang memuat aturan-aturan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Pengendalian kegiatan diperlukan untuk menjamin bahwa target yang ditetapkan akan dapat dicapai dan masalah yang ditemui dapat diidentifikasi dan diselesaikan sedini mungkin. Selain itu, pengendalian terutama di tahap perencanaan bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan menjamin bahwa dana yang dialokasikan memberikan

Laporan Kinerja 2017

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sambutan

kontribusi signifikan pada pencapaian kinerja organisasi. Lebih lanjut, pengendalian dapat digunakan sebagai *feedback* untuk perencanaan berikutnya.

Kemampuan manajemen tidak kalah pentingnya dengan kemampuan teknis terutama untuk menerjemahkan kebijakan dan arahan pimpinan agar menjadi program dan kegiatan prioritas. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) BPOM dalam bidang manajemen program dan kegiatan, Biro Perencanaan dan Keuangan secara terus menerus dan berkesinambungan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas SDM bidang manajemen. SDM yang berkualitas diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan program sehingga sasaran dan tujuan organisasi tercapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Biro Perencanaan dan Keuangan serta dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja BPOM dari tahun ke tahun.

Jakarta, 1 Februari 2018

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vii
Ringkasan Eksekutif.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Gambaran Umum.....	1
I.2 Aspek Strategis Dan Isu Strategis.....	5
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 11
II.1 Rencana Strategis 2015-2019	11
II.2 Menghitung Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	14
II.3 Perjanjian Kinerja 2017	15
II.4 Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 19
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2017	19
III.2 Realisasi Anggaran Tahun 2017	35
III.3 Analisis Efisiensi Kegiatan	36
 BAB IV PENUTUPAN	 41
IV.1 Kesimpulan.....	41
IV.2 Saran.....	43
 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2
Gambar 2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan	11
Gambar 3. Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP Unit Eselon II Tahun 2015-2016-2017	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Profil Sumberdaya Manuasia Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin Tahun 2017.....	4
Tabel 2.	Isu Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017.....	8
Tabel 3.	Profil Sumberdaya Manusia Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin Tahun 2017.....	12
Tabel 4.	Metode Penghitungan Indikator Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019.....	14
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017.....	15
Tabel 6.	Kriteria Berdasarkan Indikator.....	16
Tabel 7.	Capaian Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan Tahun 2017.....	18
Tabel 8.	Kategori Hasil Penilaian Terhadap SAKIP.....	20
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 dengan realisasi Tahun 2015 dan 2016.....	28
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 dengan target kinerja Jangka Menengah (Tahun 2019).....	28
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2017 dengan Realisasi Tahun 2015, 2016 dan target Kinerja Jangka Menengah (Tahun 2019).....	31
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Realisasi Tahun 2015, 2016 dan target Kinerja Jangka Menengah (Tahun 2019).....	32
Tabel 13.	Realisasi Anggaran Tahun 2017.....	33
Tabel 14.	Penghitungan Efisiensi Per Sasaran Strategis/Kegiatan Yang Diperoleh dari Rata-rata Tingkat Efisiensi Sub Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan.....	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja tingkat eselon II wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai media evaluasi untuk melihat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan yang bermuara pada pencapaian visi dan misi Badan POM. Dari hasil evaluasi dapat dilihat prioritas kegiatan yang harus diutamakan dalam perencanaan-perencanaan selanjutnya, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan sumber dana dibandingkan dengan tuntutan lingkungan strategis yang semakin berkembang.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2017, Biro Perencanaan dan Keuangan telah mengukur capaian kinerja sasaran strategis sesuai Renstra 2015-2019. Pencapaian indikator kinerja 2 sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan memperoleh kriteria BAIK karena 100% dari target yang ditetapkan berhasil dicapai. Kedua sasaran kegiatan tersebut adalah : 1) Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan hasil evaluasi yang terintegrasi; dan 2) Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi. Indikator kedua sasaran tersebut juga adalah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan. Pencapaian kedua sasaran kegiatan tersebut dibahas secara lebih detil pada BAB III Laporan ini.

Pada Laporan Kinerja 2017, kami juga membahas pencapaian sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan yang pencapaiannya pada kriteria KURANG, yaitu Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM. Hal ini disebabkan karena dari 3 indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis, terdapat 1 indikator yang pencapaiannya pada kriteria KURANG yaitu Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai

Laporan Kinerja 2017

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Ringkasan Eksekutif

SAKIP A. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2017, belum ada unit kerja yang berhasil mencapai nilai SAKIP A sementara target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 12 unit kerja. Walaupun demikian terjadi peningkatan nilai SAKIP di semua unit kerja BPOM dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk 2 indikator sasaran strategis lain, yaitu Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO 9001:2008 secara konsisten, berhasil mencapai 100% target yang ditetapkan sehingga berada pada kriteria BAIK.

Pada tahun 2017, Biro Perencanaan dan keuangan telah melakukan reviu Renstra 2015-2019, berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja, disepakati untuk merevisi 1 indikator yaitu Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP A menjadi “Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP minimal 75”.

Pada BAB III dilaporkan dari 69 sub kegiatan yang terlaksana di Biro Perencanaan dan Keuangan dari tahun 2017 terdapat 1 sub kegiatan yang terhitung tidak efisien. Sebagai catatan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang, maka Biro Perencanaan dan Keuangan akan berupaya untuk mempertahankan kinerja yang sudah tercapai dengan baik dan terus melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja kegiatan yang belum memuaskan.

BAB I

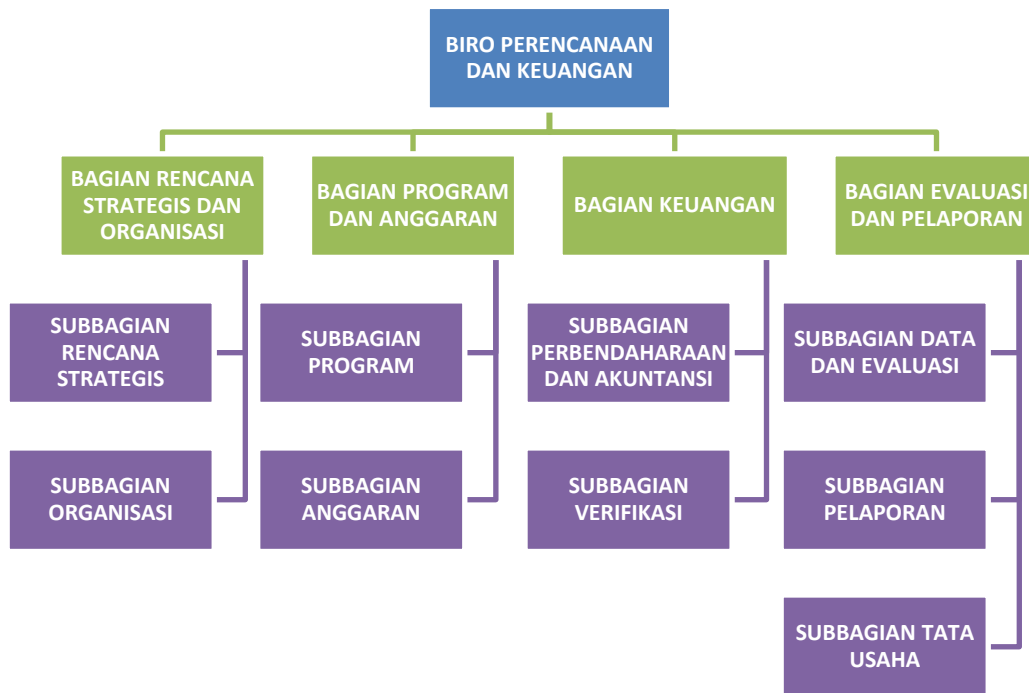
PENDAHULUAN

I.1. GAMBARAN UMUM

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004, tugas Biro Perencanaan dan Keuangan adalah “melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan”. Fungsi yang diselenggarakan untuk melaksanakan tugas tersebut yaitu :

- a. Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri;
- c. Pelaksanaan manajemen keuangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

I.1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai 4 (empat) bagian yaitu :

- a. Bagian Rencana Strategis dan Organisasi,
 - b. Bagian Program dan Anggaran, Bagian Keuangan, dan
 - c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bagian Keuangan
-
- a. Bagian Rencana Strategis dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi dan tata kerja di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Rencana Strategis dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis.
 - 2) Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata kerja.

- b. Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan program jangka pendek dan jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan program.
 - 2) Pelaksanaan penyusunan anggaran serta petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional anggaran dari penerima negara bukan pajak, belanja rutin dan pembangunan serta pinjaman luar negeri.

- c. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan perbendaharaan.
 - 2) Pelaksanaan urusan verifikasi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan verifikasi anggaran.

- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan sistem dan mekanisme evaluasi serta pengolahan data dan evaluasi program.
 - 2) Pelaksanaan penyusunan sistem dan mekanisme pelaporan serta penyusunan laporan.
 - 3) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

I.1.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian menurut golongan, pendidikan akhir dan jenis kelamin, pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2017 sejumlah 44 orang Aparatur Sipil Pemerintah (ASN).

LAPORAN KINERJA 2017

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Pendahuluan

Golongan	PENDIDIKAN								JUMLAH		TOTAL
	S2		S1		D3		SLTA				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Gol. II	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	3
Gol. III	1	2	7	12	-	1	3	3	11	18	29
Gol. IV	1	6	1	4	-	-	-	-	2	10	12
Jumlah	2	8	8	16	1	3	3	3	14	30	44

Tabel 1 : Profil Sumberdaya Manusia Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin Tahun 2017.

Dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2017 berdasarkan :

a. Golongan :

Golongan III dengan jumlah tertinggi yaitu 29 orang (65,9%), diikuti dengan golongan IV 12 orang (27,3%) dan golongan II 3 orang (6,8%).

b. Pendidikan akhir :

Pendidikan akhir S1 dengan jumlah tertinggi yaitu 24 orang (54,6%), diikuti dengan S2 sejumlah 10 orang (22,8%), D3 dan SLTA masing-masing 4 orang (@ 9,1%)

c. Jenis Kelamin :

Jenis kelamin perempuan dengan jumlah tertinggi yaitu 30 orang (68,2%) dan laki-laki 14 orang (31,8%)

Selain ASN, Biro Perencanaan dan Keuangan juga mempunyai 23 orang tenaga pramubakti, dimana pendidikan S1 sejumlah 13 orang, D3 sejumlah 7 orang dan SLTA sejumlah 3 orang, atau laki-laki 12 orang dan perempuan 11 orang.

I.1.3. Sarana dan Prasarana

Biro Perencanaan dan Keuangan didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas antara lain :

a. Ruang kerja yang terdiri atas Ruang Kepala Biro, Ruang Kepala Bagian dan Ruang Kepala Sub bagian serta ruang kerja staf.

- b. Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain untuk melaksanakan tugas.
- c. Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.

Rincian peralatan, meubelair, dan perangkat lainnya pada Lampiran 1.

I.1.4. Anggaran

Pada tahun 2017, Biro Perencanaan dan Keuangan mendapat anggaran yang semula Rp 41.179.838.000,- setelah APBN-P menjadi Rp 35.637.431.000,-. Realisasi anggaran netto Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2017 menurut aplikasi OMSPAN sebesar Rp 32.074.305.620,- (90%)

I.2. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

I.2.1. ASPEK STRATEGIS

BPOM mempunyai 4 (empat) unit eselon I yang terdiri dari 3 (tiga) unit teknis eselon I yaitu Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya, dan 1 (satu) unit pendukung manajemen pelaksana teknis yaitu Sekretariat Utama (Sektama). Salah satu unit kerja eselon II yang mendukung pelaksana tugas Sektama adalah Biro Perencana dan Keuangan, utamanya dalam hal melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, salah satu tahapan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga sesuai dengan fokus prioritas RPJMN.

Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan Renstra BPOM, Renstra unit kerja eselon I dan eselon II (di pusat dan daerah) dan memastikan Renstra yang disusun telah sesuai dengan:

- a. Pedoman dari Kementerian Perencana Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pengawas Pembangunan Nasional (Bappenas) serta setiap kebijakan strategis BPOM tertuang didalamnya.
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
- c. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga,

Untuk mewujudkan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra perlu dilaksanakan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja yang mendukung sasaran strategis tersebut.

Dalam melakukan kegiatan harus didukung anggaran yang terlebih dahulu disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (RENJA) dan DIPA. Biro Perencanaan dan Keuangan mengawal proses perencanaan kegiatan tersebut dan memastikan pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja berjalan sesuai ketentuan. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan pemantauan secara berkala pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RKP dan DIPA serta melakukan pelaporan capaian tersebut ke dalam sistem monitoring dan evaluasi (monev) secara *on line* dan laporan kinerja.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah menyusun dan menyajikan laporan kinerja instansi pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dikelola. Laporan ini untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang terukur dengan sasaran target kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi dasar bagi BPOM

baik unit kerja eselon I, unit kerja eselon II dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk melaksanakan SAKIP.

Pada setiap akhir semester 1 dan akhir tahun anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan organisasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas pelaksanaan tupoksi dan penggunaan anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja BPOM. Laporan Kinerja merupakan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang perlu ditingkatkan agar nilai SAKIP BPOM maksimal. Dalam rangka mencapai hal tersebut, setiap tahun Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan Bimbingan Teknis SAKIP dengan mengundang wakil dari setiap unit kerja pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan adanya Bimbingan Teknis SAKIP, diharapkan terjadi persamaan persepsi semua unit kerja pusat dan daerah terkait pelaksanaan, perhitungan dan pelaporan kinerja, yang dapat berdampak pada peningkatan nilai SAKIP BPOM.

I.2.2. ISU STRATEGIS

Pada tahun 2017, dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai beberapa isu strategis yaitu :

Bagian	Issue Strategi	Tindak Lanjut
Renstra dan Organisasi	1. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 2. Penyusunan Peraturan BPOM tentang OTK BPOM 3. Penyusunan Peraturan BPOM tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019	1. Diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2. Diterbitkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang OTK BPOM. 3. Diterbitkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019.

LAPORAN KINERJA 2017

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Pendahuluan

Bagian	Issue Strategi	Tindak Lanjut
	4. Penyusunan Grand Desain Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2045 5. Mengkoordinir pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2015	4. Tersusunnya Dokumen Grand Desain BPOM Tahun 2020-2045 5. Diperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 untuk 41 unit kerja BPOM.
Program dan Anggaran	Penguatan Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan Peraturan BPOM no.26 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja BPOM.	1. Pelaksanaan resource forum secara efektif sebagai dasar perencanaan dan penganggaran tahun n+1. 2. Membuat Aplikasi e-<i>planning</i> dan e-<i>budgeting</i>. 3. Persiapan revisi program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan Per BPOM 26/2017 tentang OTK BPOM. 4. Pendanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan bersumber dari hibah.
Keuangan	Mempertahankan Opini WTP atas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan BPOM	1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi BPOM 2. Mendorong unit layanan publik penerima PNBP dan PIOM melakukan integrasi <i>e-payment</i>/ pembayaran secara elektronik dengan Sistem Penerimaan Online (SIMPONI) Kemenkeu, untuk mendukung akuntabilitas pelaporan keuangan 3. Meningkatkan kompetensi pegawai yang bertugas dalam

Bagian	Issue Strategi	Tindak Lanjut
		pelaksanaan anggaran/kebundaharaan, termasuk pegawai yang bertugas dalam menunjang proses pelaporan keuangan
Evaluasi dan Pelaporan	1. Beberapa unit kerja menafsirkan definisi operasional indikator kinerja tidak sesuai 2. Ketidak patuhan unit kerja dalam menginput data hasil pengawasan 3. Mayoritas unit kerja melaksanakan kontrak dengan pihak ke tiga dilakukan pada akhir tahun.	1. Dilakukan pembahasan bersama (seluruh unit kerja pusat dan daerah) terhadap indikator kinerja dan definissi operasionalnya dan memberikan <i>desk consultation</i>. 2. Harus selalu diingatkan melalui grup WA 3. Akan dipantau sejak pertemuan monev triwulanan.

Tabel 2 : Isu strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

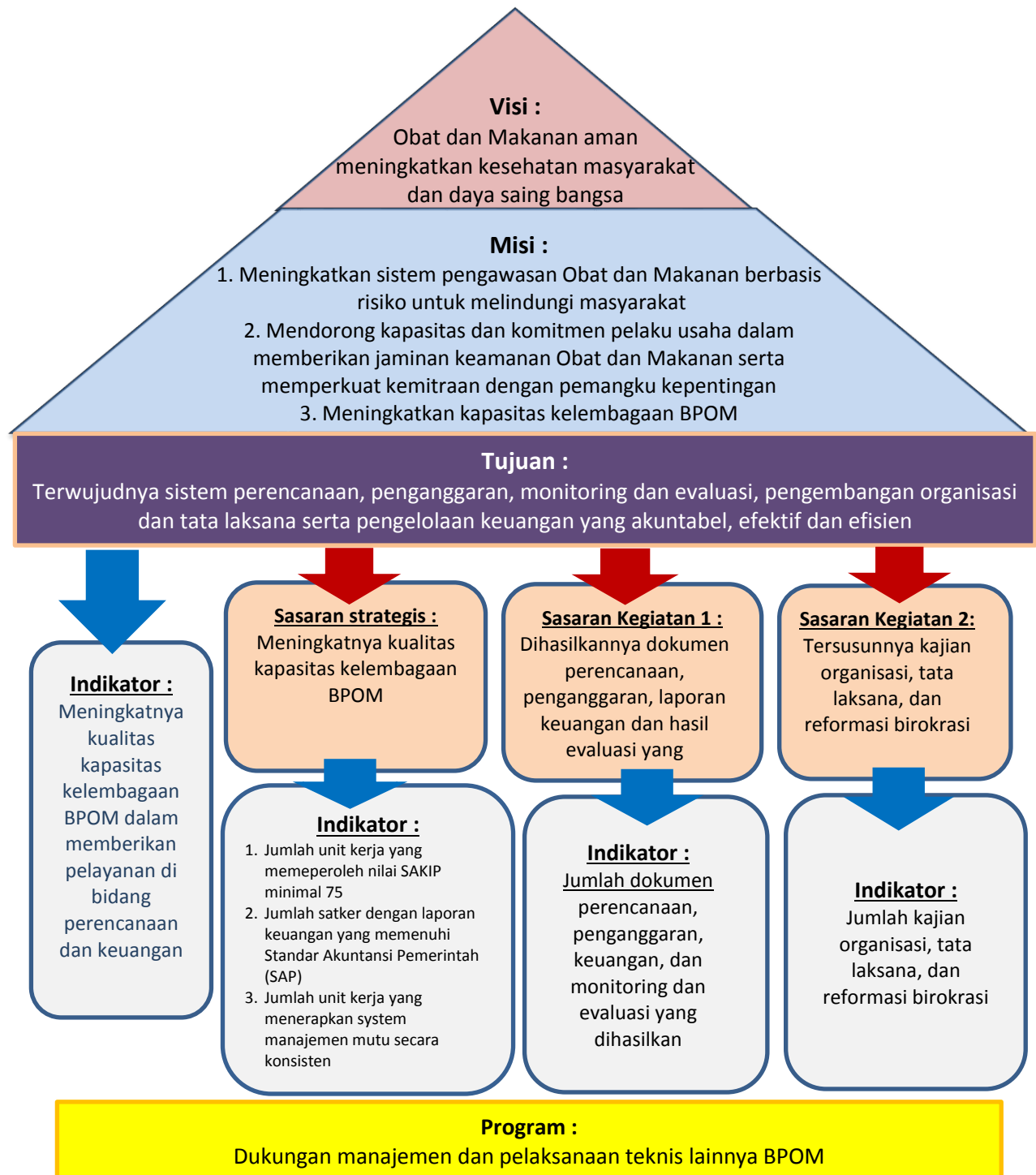
II.1. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Perencanaan kinerja jangka waktu lima tahun pada periode RPJMN ke-3 telah dituangkan dalam Rencana Strategis BPOM tahun 2015-2019. Rencana strategis (Renstra) merupakan upaya sistematis dan berkesinambungan yang diarahkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi melalui pencapaian sasaran strategis dalam rangka mengemban mandat yang diberikan pemerintah, dengan memperhatikan tantangan, peluang, potensi, dan kelemahan yang dihadapi dari lingkungan strategisnya. Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2015-2019 dengan Keputusan kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 01.02.211.05.15.1089 Tahun 2015 yang disusun mengacu pada Rencana Strategis BPOM 2015-2019 dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan, Program Kerja dan Indikator Kinerja, sesuai tugas pokok dan fungsi.

REVIU RENSTRA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2015-2019

Mengacu pada reviu Renstra BPOM yang dituangkan dalam Peraturan BPOM no. 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2015-2019, Biro Perencanaan dan Keuangan juga telah melaksanakan reviu terhadap Renstra Tahun 2015-2019. Reviu Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor OR.01.02.211.12.17.3222 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019.

Sesuai dengan hasil reviu Rencana Strategis BPOM tahun 2015-2019, maka Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan seperti dalam gambar tersebut di bawah ini.



Gambar 2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator sasaran strategis dan sasaran kegiatan yang sekaligus merupakan IKU Biro Perencanaan dan Keuangan, maka dilakukan revisi terhadap salah satu indikator sasaran strategis yaitu “Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A”. Selama 3 tahun berturut-turut (2015, 2016, dan 2017), capaian

indikator ini adalah 0. Penyebab kegagalan utama adalah karena terjadinya perubahan kebijakan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana terdapat perubahan salah satu kategori penilaian yaitu nilai batas bawah kategori A semula 75 menjadi 80. Oleh karena itu, pada pembahasan reviu renstra, disepakati untuk merevisi indikator ini menjadi “Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP minimal 75” yang dianggap lebih realistis untuk dicapai. Berikut tabel sasaran strategis, sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam reviu Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019.

Sasaran Strategis, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	2	6	12	-	-
	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP minimal 75	-	-	-	3	6
	2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	40	40	41	41	41
	3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	55	55	56	56	57
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	15	15	15	15	15
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1	1	1	1	1

Tabel 3 : Profil Sumberdaya Manusia Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin Tahun 2017.

**II.2. Menghitung Indikator Sasaran Strategis/
Indikator Kinerja Utama**

Berdasarkan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019, metode penghitungan setiap indikator ditetapkan sebagai berikut:

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
1 Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP 75	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan hasil evaluasi Kemen PAN dan RB atas penerapan komponen manajemen kinerja (SAKIP) yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja sesuai Permen PAN dan RB terkini.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM oleh Inspektorat atas pelaksanaan SAKIP tahun sebelumnya (n-1) yang disampaikan pada tahun berjalan (n)
2 Jumlah Satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	a. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah suatu sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dengan pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, hutang, dan ekuitas seluruh entitas pemerintah. b. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi BPOM yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program c. Penerapan SAP mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Laporan Keuangan Satuan Kerja yang menerapkan SAP
3 Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	a. Unit kerja meliputi unit Eselon II di lingkungan Pusat BPOM serta Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia b. Sistem Manajemen Mutu adalah suatu sistem manajemen organisasi yang mengacu pada standardisasi internasional yang difokuskan pada proses kegiatan (ISO 9001). Penerapan sistem mutu ISO 9001 terhadap dokumen level 1 (manual mutu), dokumen level 2 (SOP), dan dokumen level 3 (instruksi kerja).	Jumlah sertifikasi ISO 9001 di masing-masing unit kerja pada tahun berjalan

INDIKATOR	KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
4 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	Diukur berdasarkan dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan selama 1 tahun anggaran terdiri dari : 1. Renstra BPOM/ Review Renstra/ Buku Putih/ <i>Grand design</i> BPOM/ Kajian Lingstra 2. Renstra Sektama/ Reviu Renstra Sektama/ Kajian Lingstra 3. Renstra Rorenkeu/ Reviu Renstra Rorenkeu/ Kajian Lingstra 4. Renja BPOM tahun n+1 5. DIPA BPOM tahun n+1/ POK tahun n+1 6. Perjanjian Kinerja BPOM tahun n 7. Perjanjian Kinerja Sektama tahun n 8. Perjanjian Kinerja Rorenkeu tahun n 9. Laporan Kinerja BPOM tahun n-1 10. Laporan Kinerja Sektama tahun n-1] 11. Laporan Kinerja Rorenkeu tahun n-1 12. Laporan tahunan BPOM tahun n-1 13. Laporan tahunan Rorenkeu tahun n-1 14. Laporan Keuangan BPOM tahun n-1 15. Laporan Keuangan Sektama tahun n-1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi Berdasarkan masing-masing dokumen perencanaan yang telah disetujui dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
5 Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Kajian Organisasi/Tata Laksana/Reformasi Birokrasi dalam rangka penataan kelembagaan BPOM.	Diukur berdasarkan kajian yang dihasilkan

Tabel 4. Metode Penghitungan Indikator Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019

Indikator kinerja yang ditetapkan telah spesifik sesuai sasaran yang dituju, mempunyai ukuran kuantitatif yang jelas, penetapan pencapaian targetnya berdasarkan pencapaian di tahun sebelumnya, dimana pencapaian tersebut diukur dalam jangka waktu 1 tahun.

II.3. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian kinerja merupakan komitmen kepala unit kerja sebagai penerima amanah kepada atasannya dan kesepakatan antara penerima dengan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja dibuat berdasarkan Renstra, oleh karena itu Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran, indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dan target

LAPORAN KINERJA 2017

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun melalui kegiatan dan anggaran yang disetujui pada tahun berjalan. Pada tahun 2017, Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPOM pada tanggal 1 Februari 2017. Dalam Laporan Kinerja tahun 2017 ini, IKU 1 Biro Perencanaan dan Keuangan masih dihitung berdasarkan “Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A”.

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2017
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	12 unit kerja
		2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	41 satker
		3. Jumlah unit kerja yang menerapkan system manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	56 unit kerja
2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	15 dokumen
3	Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	1 kajian

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017, ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan mengelola kegiatan Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp 41.149.838.000,-. Kegiatan ini dijabarkan kedalam sub kegiatan yang dilaksanakan oleh keempat bagian yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.

II.4. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Sekretariat Utama, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, sebagai berikut :

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

Tabel 6. Kriteria berdasarkan indikator

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 diukur sesuai yang dijanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 capaian Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan berdasarkan kriteria secara ringkas seperti yang dijelaskan pada BAB II. **Dikarenakan kelima sasaran strategis dan kegiatan ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan, maka pengukuran ini juga merupakan analisis pencapaian KU Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2017.** Mekanisme pengumpulan data kinerja dilakukan sesuai dengan keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.04.2.21.08.16.3115 tahun 2016 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di BPOM.

Pencapaian Sasaran strategis/ Sasaran Kegiatan dengan katagori **BAIK (100%)** adalah:

1. Sasaran kegiatan: Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi.
2. Sasaran kegiatan : Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi

Pencapaian Sasaran strategis/ Sasaran Kegiatan dengan katagori **KURANG (67,7%)** adalah :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Laporan Kinerja 2017

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja

Capaian masing-masing indikator dari setiap Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	12	0	0%	 Kurang (67,7%)
		2. Jumlah Satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	41	41	100%	
		3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	56	56	100%	
2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan hasil evaluasi yang terintegrasi	4. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	15	15	100%	 Baik
3	Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	5. Jumlah kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	1	1	100%	 Baik

Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan Tahun 2017

Pengukuran kinerja diatas dilakukan setiap triwulan, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam rencana aksi perjanjian kinerja. Kinerja triwulan dipantau dan dievaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan mencari solusinya.

Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja, pada tahun 2015 telah dibuat sistem *e-performance* BPOM berbasis elektronik. Setiap unit kerja melakukan input capaian kinerja, yang dimonitor oleh Biro Perencanaan dan Keuangan setiap triwulan. Pada tahun 2017, *e-performance* dikembangkan untuk mengakomodir peta strategi dalam 4 perspektif (sesuai hasil reuiu Renstra BPOM), pelaporan indikator kinerja hingga eselon IV, kinerja individu yang juga dihubungkan dengan serapan anggaran. *E-performance* dengan pengembangan baru dapat digunakan segera setelah struktur baru BPOM telah

berjalan, termasuk disetujuinya program, kegiatan, indikator dan target unit pusat dan daerah.

Analisis pencapaian sasaran strategis dan sasaran kegiatan Tahun 2017:

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Jumlah Unit Kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A.
2. Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten.

Ketiga indikator tersebut juga sekaligus merupakan **3 dari 5 Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan. Sehingga analisis pencapaian dibawah ini merupakan pengukuran realisasi dari IKU Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2017.**

Indikator 1 :
Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP A

Nilai SAKIP unit kerja BPOM diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2017. Ruang lingkup evaluasi adalah :

1. Penilaian terhadap pemenuhan dan kualitas dokumen perencanaan kinerja yang meliputi dokumen Renstra, perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta penilaian terhadap keselarasan antar dokumen perencanaan;
2. Penilaian terhadap sistem pengukuran kinerja, termasuk pemenuhan indikator kinerja yang baik berdasarkan peraturan yang berlaku, serta penyajian capaian kinerja dan hasil analisisnya dalam pelaporan kinerja berdasarkan azas-azas cara penyajian informasi yang baik;

3. Penilaian terhadap implementasi evaluasi internal berikut pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi.

Kategori hasil penilaian terhadap SAKIP adalah :

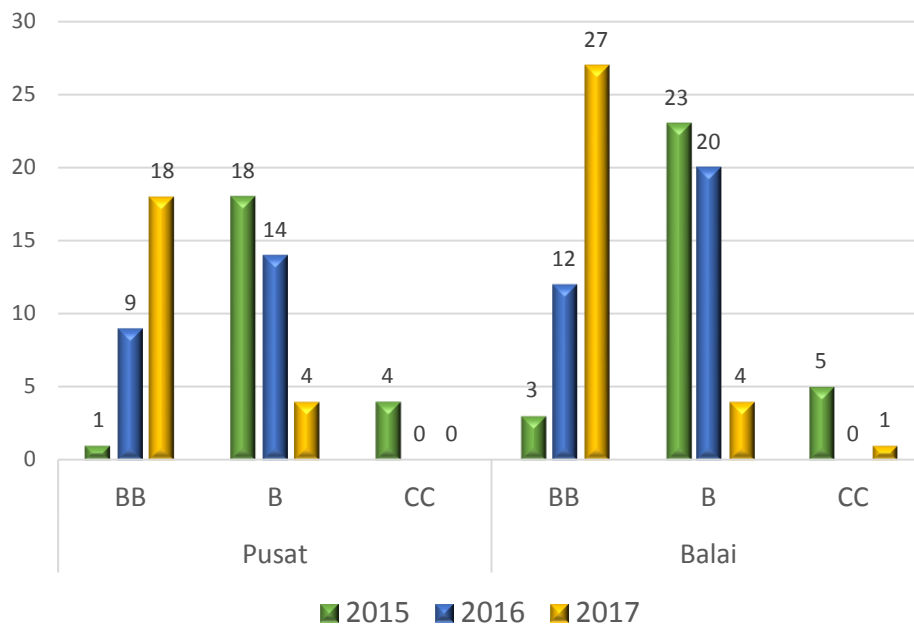
No	Nilai pemenuhan terhadap kinerja	Kategori	Keterangan
a.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
b.	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
c.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
d.	> 60 s.d. 70	B	Baik
e.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup Baik
f.	> 30 s.d. 50	C	Agak Kurang
g.	≤ 30	D	Kurang

Tabel 8. Kategori hasil penilaian terhadap SAKIP

Walaupun tahun 2017, target sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja belum berhasil tercapai, namun dari tahun 2015 hingga 2017 terjadi peningkatan nilai SAKIP unit kerja di BPOM baik pusat maupun Balai. Hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat terhadap 56 unit kerja pusat dan BB/BPOM adalah 45 unit kerja memperoleh predikat BB atau “Sangat Baik” dengan rentang nilai terendah yaitu 70,02 dan tertinggi 75,75. Sementara itu, 8 unit kerja berada pada kategori B atau “Baik” dengan rentang nilai terendah adalah 62,97 dan yang tertinggi 69,89. Pada evaluasi tahun ini terdapat 1 unit kerja dengan predikat CC atau “Cukup Baik”, hal ini dapat dimaklumi karena unit kerja tersebut adalah Balai POM yang baru beroperasi mulai tahun 2017 yaitu Balai POM di Sofifi.

Namun capaian ini belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 6 unit kerja memperoleh predikat A. Oleh karena itu pencapaian indikator sasaran strategis ini dikategorikan “**KURANG**” karena **tidak ada unit kerja (0%) yang berhasil mencapai nilai SAKIP A. Dibandingkan dengan capaian indikator ini pada tahun lalu, maka belum ada perubahan.**

Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP unit Eselon II Tahun 2015-2016-2017



Gambar 3. Rekapitulasi Hasil Evaluasi AKIP unit Eselon II Tahun 2015-2016-2017

Dari hasil evaluasi SAKIP di lingkungan internal BPOM, Inspektorat menemukan beberapa kelemahan antara lain :

1. Target kinerja di dalam Renstra maupun dalam perencanaan kinerja tahunan belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan basis data yang akurat dan memadai.
2. IKU untuk sebagian unit kerja masih **BELUM CUKUP** untuk merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai atau untuk menyimpulkan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.
3. Laporan kinerja yang disusun masih **terbatas pada pemenuhan kewajiban formal**, sebagai media untuk penyampaian capaian sasaran, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi.
4. Pelaksanaan evaluasi internal belum diarahkan pada penilaian mengenai **keberhasilan** maupun **kegagalan** pencapaian sasaran unit kerja.
5. Evaluasi internal belum menghasilkan **alternatif perbaikan** atau **peningkatan kinerja** yang dapat dilaksanakan oleh unit kerja.

Saran perbaikan dari Inspektorat:

1. Melakukan reviu terhadap Renstra, khususnya terkait dalam penentuan target
2. Meningkatkan kualitas *cascade* indikator kinerja tingkat lembaga sampai pada tingkat Balai/Balai Besar POM dan individu pegawai (SKP), sehingga dapat dipastikan seluruh entitas unit kerja dan individu pegawai dalam organisasi BPOM memiliki uraian kinerja yang jelas dan terukur.
3. Meningkatkan evaluasi program yang fokus pada analisis hasil capaian kinerja dan keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis lembaga dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi
4. Mengoptimalkan implementasi *e-performance* yang sudah dibangun, khususnya terkait dengan cakupan implementasi, tingkat keandalan data kinerja serta pemanfaatan *e-performance*, oleh setiap jenjang pimpinan untuk memantau perkembangan capaian kinerja secara berkala.
5. Memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi pertanggungjawaban kinerja sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja di tiap tingkatan organisasi untuk memberikan **reward and recognition** atas capaian kinerja.
6. Terus mendorong upaya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun Balai/Balai Besar POM, melalui evaluasi maupun bimbingan teknis akuntabilitas kinerja.

Indikator	Target 2017	Capaian 2017	Persentase Capaian	Kriteria
Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP A	12	0	0	 Kurang

Upaya yang dilakukan untuk Perbaikan Capaian Target Indikator

Dalam 3 tahun pelaksanaan Renstra 2015-2019 telah dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target indikator tiap sasaran strategis dan sasaran kegiatan, maka pada tahun 2017 Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan reviu terhadap Renstra. Dari hasil reviu disepakati untuk mengubah 1 indikator yaitu **“Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP A”** menjadi **“Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP minimal 75”**. Hal ini dilakukan karena selama 3 tahun ini pencapaian indikator ini tidak pernah mencapai target, hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP dimana perubahan kategori penilaian, salah satunya adalah nilai batas kategori A dari 75 menjadi 80, sehingga sulit untuk dicapai.

Indikator 2:

Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan di Kementerian/Lembaga, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh BPOM merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dilakukan berdasarkan pada kesesuaian SAP, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian indikator ini mendukung capaian indikator BPOM yaitu **“Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK”** dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan hasil audit BPK tahun 2017, laporan keuangan BPOM Tahun 2016 berhasil memperoleh opini WTP. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa seluruh satker di BPOM telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sehingga pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini dikategorikan **“BAIK”** (100%) karena **41 satker di BPOM telah menyusun Laporan Keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).**

Laporan Kinerja 2017

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja

Indikator	Target 2017	Capaian 2017	Persentase Capaian	Kriteria
Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	41	41	100%	 Memuaskan

Untuk mendukung pencapaian Sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan dengan indikator “Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”, Biro Perencanaan menyelenggarakan beberapa sub kegiatan:

1. Bimbingan teknis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyusunan laporan keuangan.
2. *Focus Group Discussion* (FGD) dan *workshop* laporan keuangan BPOM.
3. Konsolidasi laporan keuangan pusat dan balai.
4. Reviu kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
5. Sosialisasi Akuntansi Berbasis AkruaI dan Kebijakan Akuntansi BPOM.
6. Monitoring dan evaluasi laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK.
7. Pendidikan dan pelatihan anggaran dan perbendaharaan.
8. Koordinasi, evaluasi dan verifikasi tagihan belanja BPOM.
9. Penatausahaan PNB dan Revisi Pedoman Pengelolaan PNB

Kendala yang dihadapi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan adalah :

1. Sering terjadi ketidaksesuaian akun baik pada perencanaan maupun pelaksanaan anggaran karena Penyusun rencana, PPK, Bendahara dan penanggungjawab teknis kegiatan belum memahami Bagan Akun Standar.
2. Kesalahan pada penggunaan menu transaksi terutama pada Aplikasi SIMAK

Upaya yang terus dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya sub kegiatan yang tidak efisien untuk tahun-tahun berikut adalah :

1. Sosialisasi untuk penyusun anggaran, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penanggungjawab kegiatan.
2. Peningkatan pengetahuan tentang perkembangan sistem/peraturan terbaru melalui diklat/bimbingan teknis/sosialisasi Sistem Akuntansi.

Indikator 3:

Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Secara Konsisten

Surveilan Konversi QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun 2017 merupakan peralihan penerapan QMS BPOM ISO 9001 versi 2008 ke versi 2015. Berdasarkan hasil Surveilan Konversi QMS ISO 9001:2015 yang dilaksanakan tanggal 29 September s.d. 17 November 2017, diperoleh hasil bahwa 56 (lima puluh lima) unit kerja, terdiri atas Manajemen Puncak BPOM, 23 (dua puluh tiga) Unit Kerja Pusat, dan 32 (tiga puluh dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM, memperoleh sertifikat ISO 9001:2015, termasuk Balai POM di Sofifi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini dikategorikan **“BAIK”** karena **berhasil mencapai 100% target yang ditetapkan yaitu 56 unit kerja berhasil menerapkan QMS secara konsisten**. Jika dibandingkan dengan target untuk tahun 2019 yaitu 57 unit kerja, maka pencapaian indikator ini adalah 98,24%.

Keberhasilan BPOM maupun unit-unit kerja di dalamnya dalam mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 selama 6 tahun ini, karena didukung oleh komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai BPOM untuk melaksanakan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten. Pada tahun 2016, sub kegiatan yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 adalah :

a. Kaji Ulang Bisnis Proses BPOM

BPOM telah melakukan kaji ulang terhadap bisnis proses, subbisnis proses, dan SOP yang menggambarkan tata hubungan kerja antar unit organisasi berdasarkan

persyaratan ISO 9001:2008 yang telah disusun sejak tahun 2011. Kaji ulang dilaksanakan mulai Agustus 2016 s.d. Mei 2017 dan disesuaikan dengan konversi ISO 9001:2015 serta Permen PANRB 35/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan hasil kaji ulang, rekapitulasi bisnis proses BPOM sebagai berikut:

Hasil kaji ulang bisnis proses dan SOP Makro BPOM tercantum dalam Manual Organisasi yang merupakan Lampiran Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.23.10.17.1307 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.23.05.17.2307 Tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 BPOM. Pengendalian Risiko dan Peluang berdasarkan ISO 9001:2015 diintegrasikan dengan SPIP mengacu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM.

b. Tinjauan Manajemen BPOM

Berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 klausul 9.3 *Management Review*, Tinjauan Manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- 1) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya.
- 2) Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu.
- 3) Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk tren dalam:
 - a) Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan.
 - b) Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi.
 - c) Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan.
 - d) Pemantauan dan pengukuran hasil.
 - e) Hasil audit.
 - f) Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan.
 - g) Kinerja penyedia eksternal.
 - h) Kecukupan sumber daya

- i) Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang
- j) Peluang untuk peningkatan

Tinjauan Manajemen BPOM merupakan salah satu agenda dalam Rapat Evaluasi Nasional BPOM. Tinjauan Manajemen BPOM yang dilaksanakan tanggal 22 November 2017 merupakan bagian terintegrasi dari proses evaluasi yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional BPOM. Tinjauan Manajemen BPOM dihadiri oleh seluruh peserta Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2017 yang terdiri atas Manajemen Puncak, Deputi Manajemen Puncak, Ketua *Quality Assurance* Pusat dan Balai (seluruh Pejabat Eselon I dan II Pusat serta Kepala Balai Besar/Balai POM), Tim Koordinator Manajemen Representatif, Tim Koordinator Auditor Internal BPOM, serta peserta Rapat Tinjauan Manajemen.

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) untuk Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan:

$$NPS = \{(1 \times 0\%) + (1 \times 100\%) + (1 \times 100\%)\} / 3 = 66.67\%$$

Dari perhitungan NPS diatas disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan adalah “KURANG”, karena pencapaian target indikator 1 adalah 0%. Penyebab kegagalan pencapaian indikator tersebut selama 3 tahun berturut-turut adalah terlalu tingginya target yang harus dicapai yaitu nilai SAKIP dengan kategori A dengan rentang nilai 80-90, sementara nilai penerapan SAKIP unit kerja tertinggi di BPOM adalah 75,75. Sehingga dalam rangka menyesuaikan target yang lebih realistis, maka pada reviu Renstra ditetapkan perubahan indikator menjadi “Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP minimal 75”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 dengan Realisasi Tahun 2015 dan 2016 :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
Meningkatnya kualitas kelembagaan BPOM	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	0	0	0
	Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	40	40	41

Laporan Kinerja 2017

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
	Jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 secara konsisten	55	55	56

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 dengan realisasi Tahun 2015 dan 2016

Secara kuantitas, terlihat bahwa capaian 2 indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu **Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi SAP** dan **Jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 secara konsisten**, mengalami peningkatan dari tahun 2015, 2016 dan 2017. Sementara agar target indikator 1 dapat tercapai, maka perlu dilakukan revisi menjadi lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi penerapan SAKIP di unit kerja BPOM. Hal ini telah dilaksanakan pada reviu Renstra sehingga disepakati mengubah indikator tersebut menjadi “**Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP minimal 75**”.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (tahun 2019) :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target Jangka Menengah	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas kelembagaan BPOM	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	0	36	0
	Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	41	41	100%
	Jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 secara konsisten	56	57	98,24%

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017 dengan target kinerja Jangka Menengah (Tahun 2019).

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, 1 indikator telah memenuhi target hingga 100% yaitu **jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi SAP**. Sementara untuk indikator ke-3, ditargetkan menjelang tahun 2019 terdapat 1 unit kerja lagi yang akan memperoleh sertifikat ISO 9001:2015, yaitu BPOM di Mamuju. Sedangkan untuk indikator 1, mulai tahun 2018 akan diubah menjadi “**Jumlah unit kerja yang**

memperoleh nilai penerapan SAKIP minimal 75” dengan target pada tahun 2018 dan 2019 adalah 3 dan 6 unit kerja.

Sasaran Kegiatan 1:

Dihasilkannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan keuangan dan Hasil Evaluasi yang Terintegrasi

Indikator sasaran kegiatan ini adalah **Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan**. Indikator ini sekaligus adalah indikator ke 4 dari IKU Biro Perencanaan dan Keuangan. Pencapaian indikator sasaran kegiatan ini adalah **"BAIK"** karena **dapat memenuhi 100% target indikator** yaitu tersusunnya 15 dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi berhasil disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2017. Dibandingkan dengan target pada tahun 2015 dan target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra yaitu 15 dokumen, maka pencapaian indikator ini masih 100%.

Indikator	Target 2017	Capaian 2017	Persentase Capaian	Kriteria
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	15	15	100%	 Memuaskan

15 dokumen yang berhasil disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2017 adalah :

1. Reviu Rencana Strategis BPOM/Grand Design BPOM
2. Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2015-2019
3. Reviu Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019
4. Rencana Kerja (Renja) BPOM Tahun 2018
5. DIPA/POK BPOM Tahun 2018
6. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2017

7. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2017
8. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017
9. Laporan Kinerja BPOM Tahun 2016
10. Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2016
11. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016
12. Laporan Tahunan BPOM Tahun 2016
13. Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016
14. Laporan Keuangan BPOM Tahun 2016
15. Laporan Keuangan Sekretariat Utama Tahun 2016

Pada tahun 2017, Biro Perencanaan dan Keuangan berhasil mengawal dan memfasilitasi tersusunnya *Grand Design* BPOM. Sejalan dengan Visi Indonesia 2045, maka periode *Grand Design* Pengawasan Obat dan Makanan disusun sampai dengan Tahun 2045. Penyusunan *Grand Design* ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program Pengawasan Obat dan Makanan, perlu disusun perencanaan strategis jangka panjang sesuai kondisi ideal yang diharapkan, berorientasi hasil, memperhatikan faktor risiko, baik yang bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, memuat strategi terobosan, dilengkapi dengan target dan perubahan yang harus terjadi, indikator kinerja yang relevan, jelas dan terukur, mencakup *road map* setiap tahunnya, serta kebutuhan ideal anggaran. Penyusunan *Grand Design* melibatkan *stakeholder* antara lain Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha, masyarakat serta para akademisi dan pakar di bidang Obat dan Makanan.

$$\text{NPS} = (1 \times 100\%) / 1 = 100\%$$

Dari perhitungan NPS diatas, disimpulkan bahwa pada tahun 2017, Biro Perencanaan dan Keuangan berhasil mencapai Sasaran Kegiatan 1. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini yaitu 15 dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, untuk ke depan Biro Perencanaan dan Keuangan akan terus berupaya agar 15 dokumen tersebut selalu meningkat dari segi kualitas.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2017 dengan Realisasi Tahun 2015, 2016 dan Target Kinerja Jangka Menengah (tahun 2019) :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2019	Capaian %
Dihasilkannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan keuangan dan Hasil Evaluasi yang Terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	15	15	15	15	100%

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2017 dengan Realisasi Tahun 2015, 2016 dan target Kinerja Jangka Menengah (Tahun 2019)

Dibandingkan dengan target pada tahun 2015, 2016 dan target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra yaitu 15 dokumen, maka secara kuantitas pencapaian indikator ini adalah 100%. Diharapkan ke depan pencapaian ini diiringi dengan peningkatan kualitas dari dokumen yang dihasilkan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Sasaran Kegiatan 2:

Tersusunnya Kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

Indikator sasaran kegiatan ini adalah **jumlah kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi**. Indikator ini sekaligus juga **merupakan indikator ke 5 dari IKU Biro Perencanaan dan Keuangan**. **Pencapaian sasaran strategis** ini adalah **"BAIK"** karena **dapat memenuhi 100% target indikator** yaitu tersusunnya 1 kajian tentang penataan dan penguatan organisasi berupa **Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM**.

Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian	Kriteria
Jumlah kajian organisasi, tata laksana dan reformasi birokratisasi	1	1	100%	 Memuaskan

Laporan Kinerja 2017

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja

Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang diundangkan tanggal 5 Desember 2017, memuat tugas, fungsi, dan susunan unit organisasi eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan BPOM sebagai penjabaran dari tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi BPOM dan unit organisasi eselon 1 BPOM yang telah ditetapkan melalui Perpres 80/2017.

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) untuk Sasaran Kegiatan 2 Biro Perencanaan dan Keuangan:

$$NPS = (1 \times 100\%) / 1 = 100 \%$$

Dari perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran tersebut, disimpulkan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan berhasil mencapai Sasaran Kegiatan 2, yaitu Tersusunnya Kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat menyusun kajian-kajian yang akan dapat mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan lebih baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Realisasi Tahun 2015, 2016 dan Target Kinerja Jangka Menengah (tahun 2019) :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2019	Capaian %
Tersusunnya Kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	jumlah kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	1	1	1	1	100%

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Realisasi Tahun 2015, 2016 dan Target Kinerja Jangka Menengah (Tahun 2019)

Dibandingkan dengan target pada tahun 2015, 2016 dan target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra yaitu 1 kajian, maka pencapaian indikator ini masih 100%. Karena setiap tahun diharapkan Biro Perencanaan dapat menghasilkan minimal 1 kajian sebagai acuan dalam pengembangan organisasi, tata laksana maupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM.

III.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis/ sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan 69 sub kegiatan pada tahun 2017. Berikut adalah realisasi anggaran (sebelum dikurangi pajak dan pengembalian) tahun 2017 per sasaran strategis dan Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan :

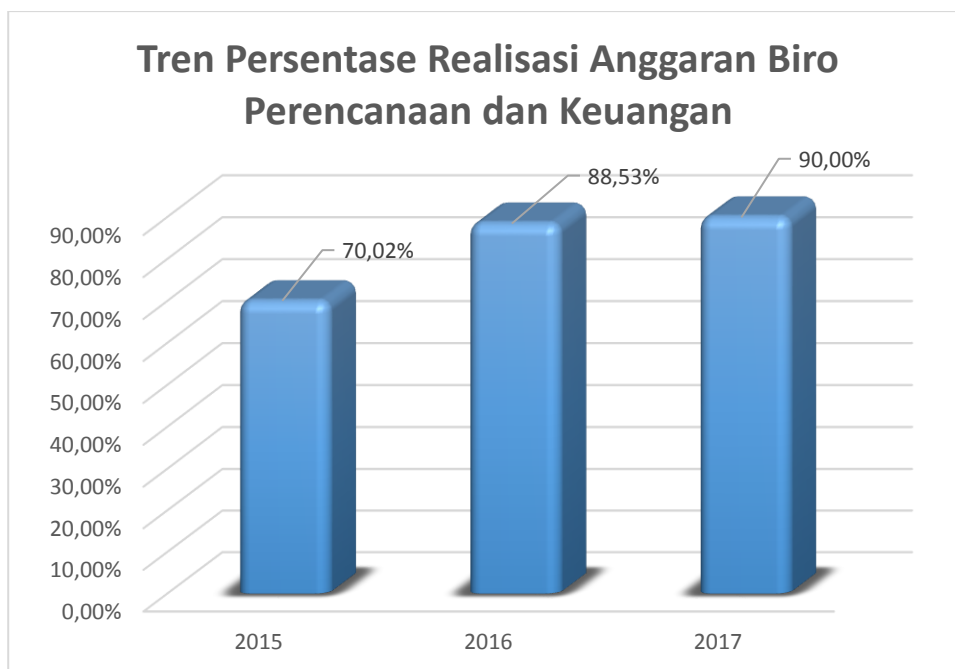
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	9.466.788.000,-	8.893.862.782,-	93,95%
2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi kegiatan yang terintegrasi	24.060.222.000,-	22.347.689.654,-	96,40%
3	Tersusunnya Kajian Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1.752.516.000,-	1.598.754.632,-	91,23%

Tabel 13. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN TA 2017, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2017 pada tanggal 22 Juni 2017, yang menginstruksikan agar para pimpinan Kementerian/Lembaga mengambil langkah-langkah efisiensi belanja barang sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Efisiensi belanja barang meliputi perjalanan dinas dan paket *meeting*, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non operasional lainnya. Efisiensi belanja barang dilakukan dengan mekanisme *self-blocking*.

Sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 4 tahun 2017 tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan surat Nomor S-584/MK.02/2017, tanggal 21 Juli 2017, hal Perubahan Pagu Belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN-P 2017, dimana Kementerian/Lembaga segera melakukan penyesuaian RKA-K/L berdasarkan perubahan belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN-P TA 2017. Dengan demikian, pagu BPOM TA 2017 yang semula Rp1.796.783.895.000,- dikurangi *self blocking* sejumlah Rp. 126.772.612.000,- sehingga menjadi Rp1.670.011.283.000,-.

Demikian juga dengan pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan yang semula dialokasikan sebesar Rp 41.179.838.000,- setelah APBN-P menjadi Rp 35.637.431.000,-. Realisasi anggaran netto Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2017 menurut aplikasi sistem OMSPAN adalah Rp 32.074.305.620,- (90,00%). Angka ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya (2015 dan 2016) yaitu 70,02% dan 88,53%.



Grafik 2. Tren Presentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan

III.3. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Meskipun pengukuran tingkat efisiensi kegiatan tidak diminta pada format Laporan Kinerja KemenPAN dan RB, namun Biro Perencanaan dan Keuangan tetap melakukan evaluasi tingkat efisiensi sub kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Rincian penghitungan efisiensi sub kegiatan tahun 2017 disampaikan pada lampiran Laporan Kinerja ini. Berikut informasi tingkat Efisiensi sub kegiatan :

Kategori Efisiensi	Jumlah sub Kegiatan
Ekstrem Efisien ($TE > 0,5$)	5
Efisien	63
Tidak Efisien	1

- a. Dari 69 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, terdapat 63 sub kegiatan yang terhitung efisien.
- b. Terdapat 5 sub kegiatan yang Tingkat Efisiensinya lebih dari 0,5, antara lain :
- Penyusunan Dokumen Trilateral Meeting (TE = 0,54)
 - Revisi Pedoman Pengelolaan PNB (TE = 0,98)
 - Koordinasi Lintas Sektor Bagian Keuangan (TE = 1,00)
 - Pemeliharaan alat elektronik Bagian Keuangan (TE = 8,38)
 - Koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan (TE = 1,20)

Tingginya Tingkat Efisiensi ini disebabkan antara lain karena:

- Penganggaran komponen belum memperhatikan tingkat prioritas/ urgensi untuk mencapai output yang ditargetkan;
 - Kesalahan dalam penetapan kontrak dengan pihak ketiga yaitu pada sub kegiatan pemeliharaan alat elektronik dimana pembayaran pemeliharaan dilakukan untuk alat yang rusak saja padahal anggarannya dialokasikan untuk semua alat elektronik;
 - Pada kegiatan Koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran perjalanan dinas untuk Kepala Biro sebagai pendamping Kepala Badan tugas ke luar negeri, yang akhirnya tidak terealisasi namun pelaksanaan koordinasi internal dilakukan dengan cukup intens sehingga laporan melebihi target yang ditetapkan.
- c. Terdapat 1 sub kegiatan yang tingkat efisiensinya negatif (-0.19) yaitu Pemantapan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di BB/BPOM. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai perencanaan dan penganggaran yang berjalan baik, akomodatif, perspektif dan menjawab masalah, serta penerapan pola perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi antar sumber-sumber anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara kunjungan langsung petugas Biro Perencanaan dan Keuangan ke BB/BPOM, apabila diperlukan dapat didampingi narasumber dari Kementerian Keuangan. Kegiatan dilaksanakan dengan metode presentasi dan diskusi, *staff working*, kunjungan lapangan, dokumentasi, dan penyusunan laporan. Realisasi kegiatan ini pada tahun 2017 adalah 44 laporan dari target 64 (69%), dengan realisasi anggaran sebesar

Rp761.386.800,00 (85%). Rendahnya realisasi output karena menyesuaikan ketersediaan waktu dari narasumber Kementerian Keuangan. Realisasi anggaran yang lebih besar dari realisasi fisik karena asistensi dilakukan ke Balai Besar/Balai POM di wilayah timur Indonesia dengan jumlah petugas lebih dari 3 (tiga) orang, sehingga membutuhkan biaya perjalanan yang lebih besar. Balai Besar/Balai POM yang berada di dekat kantor pusat BPOM seperti Jakarta, Bandung tidak dilakukan asistensi perencanaan dan penganggaran. Hal ini mengakibatkan realisasi fisik rendah.

Berikut penghitungan Efisiensi per sasaran strategis/kegiatan yang diperoleh dari rata-rata Tingkat Efisiensi sub kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan:

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	TE rata-rata	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	0,12	Efisien
2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi kegiatan yang terintegrasi	0,29	Efisien
3	Tersusunnya Kajian Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	0,06	Efisien

Tabel 14. penghitungan Efisiensi per sasaran strategis/kegiatan yang diperoleh dari rata-rata Tingkat Efisiensi sub kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan

Dari tabel diatas, diketahui bahwa tingkat efisiensi tertinggi adalah pada sasaran kegiatan ke dua yaitu **Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi kegiatan yang terintegrasi** dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,29. Tingkat efisiensi terendah adalah pada sasaran kegiatan **Tersusunnya Kajian Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi**. Walaupun dalam sasaran kegiatan kedua terdapat satu-satunya sub kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan yang TE-nya negatif namun TE rata-rata sasarannya menjadi paling tinggi dikarenakan terdapat beberapa sub kegiatan yg TE nya besar dari 1.

Laporan Kinerja 2017

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan data dan informasi diatas, maka Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan :

1. Tindak lanjut dari hasil evaluasi akuntabilitas program/ kegiatan pada tahun 2017 yang berupa perbaikan perencanaan tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya.
2. Tindak lanjut dari hasil evaluasi program/ kegiatan berupa perbaikan kinerja, terbukti penilaian evaluasi akuntabilitas Biro Perencanaan dan Keuangan yang meningkat dari nilai 71,45 pada tahun 2016 menjadi 72,17 pada tahun 2017 walaupun masih dalam kategori BB. Ke depan, diharapkan dapat meningkat dengan lebih signifikan.

BAB IV

PENUTUPAN

VI.1. KESIMPULAN

Pada tahun 2017, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan reviu terhadap Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015-2019 dan hasilnya adalah menyepakati perubahan 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP 75”. Untuk evaluasi SAKIP pada laporan kinerja tahun ini, pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun ini masih mengacu kepada indikator Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019 yaitu “Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A”.

Pencapaian kinerja 2 sasaran kegiatan di Biro Perencanaan dan Keuangan terhitung BAIK karena pencapaian indikator masing-masing adalah 100% dari target, yaitu :

1. **Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan hasil evaluasi yang terintegrasi**, dengan indikator **Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan**. Target 15 dokumen tersebut berhasil diselesaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2017.
2. **Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi** dengan indikator **jumlah kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi yang disusun**. Target 1 kajian tentang penataan dan penguatan kelembagaan berhasil disusun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2017 yaitu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja .

Oleh karena itu, pencapaian kedua indikator tersebut yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan mencapai kriteria BAIK.

Namun untuk sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM, pencapaian kinerjanya pada kriteria KURANG. Hal ini disebabkan karena dari 3 indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis, terdapat 1 indikator yang pencapaiannya pada kriteria KURANG yaitu Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP A. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2016, **tidak ada unit kerja yang berhasil mencapai nilai SAKIP A. Sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 12 unit kerja memperoleh nilai SAKIP A.** Walaupun demikian, hasil evaluasi SAKIP unit kerja dari Inspektorat tersebut menunjukkan peningkatan dimana terdapat 45 unit kerja memperoleh predikat nilai SAKIP pada kriteria BB, 8 pada kriteria B, dan 1 kriteria CC.

Untuk 2 indikator sasaran strategis lain, yaitu Jumlah satuan kerja dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO 9001:2008 secara konsisten, berhasil mencapai 100% target yang ditetapkan sehingga berada pada kriteria BAIK.

Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2017 adalah 90,00%. Realisasi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 88,53%. Angka itu sudah cukup baik, Biro Perencanaan dan Keuangan tetap perlu mempertahankan kinerja untuk meningkatkan realisasi anggaran di tahun-tahun mendatang. Pada BAB III dilaporkan juga bahwa dari 69 sub kegiatan yang dijalankan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dari tahun 2017 terdapat 1 sub kegiatan yang dihitung tidak efisien.

IV.2. SARAN

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka perbaikan kinerja dan antisipasi kemungkinan masalah yang akan dihadapi nantinya adalah:

1. Dalam mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik, perlu dilakukan secara terus menerus :
 - a. Kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu yang telah dijalankan lebih kurang 6 tahun di Biro Perencanaan dan Keuangan dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi sumber daya pada setiap kegiatan yang dijalankan.
 - b. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan serta pelaporan kinerja.
 - c. Memastikan hasil evaluasi kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan berikutnya.
2. Dalam meningkatkan pencapaian kinerja yang masih kurang :
 - a. Melakukan monitoring secara lebih intensif atas pencapaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
 - b. Mengawal hasil revaluasi Renstra yang sudah disepakati pada tahun 2017 terutama untuk pencapaian kinerja sasaran strategis yang indikatornya telah diubah.
3. Langkah-langkah lain yang perlu tersusun ditingkatkan yaitu :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan suprasistem terkait antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, BAPPENAS, Komisi IX DPR RI dan sebagainya.
 - b. Meningkatkan kompetensi ASN Biro Perencanaan dan Keuangan melalui pendidikan lanjutan ke jenjang Magister serta pelatihan atau kursus perencanaan dan manajemen.

RENCANA STRATEGIS

Lampiran 1

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015-2019

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Program
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	2	6	12	20	30	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Teknis Lainnya
		Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	40	40	41	41	41	
		Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	55	55	56	56	57	
1	Sasaran Kegiatan Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi kegiatan yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	15	15	15	15	15	
2	Tersusunnya kajian Organisasi Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	1	1	1	1	1	



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755; 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Reri Indriani, M.Si
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Februari 2017

Pihak Kedua,
Sekretaris Utama,

Dra. Reri Indriani, M.Si.
NIP 19630527 198903 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM
NIP 19690504 199803 1 001



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP <i>meningkat 75</i>	12
		Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	41
		Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	56
1	Sasaran Kegiatan Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi kegiatan yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	15
2	Tersusunnya kajian Organisasi Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	1

Kegiatan
 Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan

Anggaran
 Rp 41.149.838.000,-

Jakarta, 6 Januari 2017

Sekretaris Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt., M. Si
 NIP. 19630527 198903 2 001

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM
 NIP 19690504 199803 1 001

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Uraian	Satuan Target	Target				Realisasi				Ket
				Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
1	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	unit kerja				12					
		Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	satuan kerja				41					
		Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	unit kerja				56					
1	Sasaran Kegiatan Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi kegiatan yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	dokumen	9	11	11	15					
2	Tersusunnya kajian Organisasi Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	kajian				1					

Jakarta, 6 Januari 2017

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM
NIP 19690504 199803 1 001

15 Dokumen Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Nama Dokumen	Target *			
		Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
1	Review Renstra BPOM/ Grand Design BPOM/ Kajian Lingstra				1
2	Reviu Renstra Sektama/ Kajian Lingstra				1
3	Reviu Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan/ Kajian Lingstra				1
4	Renja Badan POM tahun n + 1		1	1	1
5	DIPA Badan POM tahun n + 1/ POK tahun n + 1				1
6	Perjanjian Kinerja Badan POM tahun n	1	1	1	1
7	Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama tahun n	1	1	1	1
8	Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun n	1	1	1	1
9	Laporan Kinerja Badan POM tahun n-1	1	1	1	1
10	Laporan Kinerja Sekretariat Utama tahun n-1	1	1	1	1
11	Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun n-1	1	1	1	1
12	Laporan Tahunan Badan POM tahun n-1		1	1	1
13	Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan tahun n-1	1	1	1	1
14	Laporan Keuangan Badan POM tahun n-1	1	1	1	1
15	Laporan Keuangan Sektama tahun n-1	1	1	1	1
	Jumlah	9	11	11	15

* Target dihitung secara kumulatif dari triwulan I s.d. Triwulan IV



KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.211.05.15.1077 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketepatan dalam melaporkan kinerja untuk pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah



-2-

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 515);

MEMUTUSKAN:

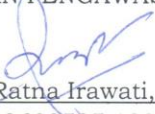
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019



-3-

- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan dan pencapaian sasaran strategis BPOM.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,


Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes.
NIP. 19630525 199103 2001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.211.05.15.1077 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019

1. NAMA ORGANISASI : BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri;
 - c. pelaksanaan manajemen keuangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan	IKU
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A
		2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
		3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten
2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	4. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan
3	Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	5. Jumlah kajian Organisasi, tata laksana, dan Reformasi Birokrasi

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes.
NIP. 19630525 199103 2001

Lampiran 4

Pengukuran Kinerja

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	12	0	0
		2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	41	41	100
		3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	56	56	100
1	Sasaran Kegiatan Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi kegiatan yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	15	15	100
2	Tersusunnya kajian Organisasi Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	1	1	100

Jumlah Anggaran Rp 35.637.431.000,- (setelah pengurangan dari penghematan dan *self blocking*)

Realisasi Anggaran Rp 32.074.305.620,-

Kegiatan : Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan

Jakarta, 31 Januari 2018
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Dra. Elin Herlina, Apt, MP
NIP. 19670418 199203 2 001

Lampiran 5

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2017

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM	Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya BPOM	Jumlah Unit Kerja yang Memperoleh Nilai Penerapan SAKIP A	Unit Kerja	2.690.058.000	2.633.494.088	98,15
		Pengembangan e-Performance	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	1.048.750.000	998.934.088	95,25
			<u>Output :</u>				
		Sosialisasi dan Bimtek SAKIP	Jumlah Paket Pengembangan E-Performance yang dihasilkan	Paket	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	802.356.000	802.201.500	99,98
			<u>Output :</u>				
		Rapat Evaluasi Nasional di Gorontalo	Jumlah dokumen laporan sosialisasi dan bimtek SAKIP yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	838.952.000	832.358.500	99,21
			<u>Output :</u>				
			Jumlah laporan/prosiding pertemuan Evaluasi Nasional di Gorontalo	Dokumen	1	1	100,00
		Sosialisasi Akuntansi Berbasis Akruel Dan Kebijakan Akuntansi BPOM - Bendahara	Jumlah Satker dengan Laporan Keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Satuan Kerja	5.422.125.000	5.009.413.108	94,02
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	429.500.000	406.125.100	94,56
			<u>Output :</u>				
			Jumlah laporan pelaksanaan Diklat SAKTI	Paket	1	1	100,00

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Sosialisasi Akuntansi Berbasis AkruaI Dan Kebijakan Akuntansi BPOM - Operator Persediaan	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	454.580.000	426.587.300	93,84
			<u>Output:</u>				
			Jumlah Balai yang dilakukan Monev LHPK	Balai	1	1	100,00
		Monitoring Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	82.250.000	77.033.050	93,66
			<u>Output :</u>				
			Jumlah Balai yang dilakukan Monev LHPK	Balai	5	5	100,00
		Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat Dan Balai)	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	397.340.000	386.514.741	97,28
			<u>Output :</u>				
			Jumlah Balai yang dilakukan Bimtek SAI & LK	Balai	25	25	100,00
		FGD Dan Workshop Laporan Keuangan Badan POM	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	726.200.000	649.204.975	89,40
			<u>Output :</u>				
			Jumlah FGD Laporan Keuangan yang dilaksanakan	Paket	2	2	100,00
		Unit Akuntansi Badan POM	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	149.760.000	122.913.722	82,07
			<u>Output :</u>				
			Jumlah insentif yang dibayarkan	Bln	8	8	100,00
		Konsolidasi Laporan Keuangan Pusat Dan Balai	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	1.872.775.000	1.837.798.000	98,13
			<u>Output :</u>				
			Jumlah konsolidasi yang dilaksanakan	Paket	2	2	100,00

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Review Sop Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	175.800.000	129.925.451	73,91
			<u>Output :</u>				
		Review Kebijakan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	Jumlah pertemuan dalam rangka reviu SOP pelaporan keuangan	Paket	4	4	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	380.900.000	270.374.469	70,98
		Sosialisasi Akuntansi Berbasis Akrual Dan Kebijakan Akuntansi BPOM - PPK Dan Penyusun Laporan Keuangan	<u>Output :</u>				
			Jumlah pertemuan dalam rangka reviu kebijakan akuntansi	Paket	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
		Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan	Dana	Rp	666.050.000	632.212.500	94,92
			<u>Output :</u>				
			Pelaksanaan SAIBA dan KA	Paket	1	1	100,00
		Pemeliharaan Dan Peningkatan QMS ISO 9001 BPOM	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	86.970.000	70.723.800	81,32
			<u>Output :</u>				
		Pelaksanaan diklat LK	Jumlah Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 secara konsisten	Unit Kerja	1.354.605.000	1.250.955.586	60
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	427.285.000	369.161.900	86,40
			<u>Output :</u>				
		Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Peningkatan QMS ISO 9001 BPOM yang dihasilkan	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Peningkatan QMS ISO 9001 BPOM yang dihasilkan	Laporan	3	3	100,00

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi kegiatan yang	Surveilans Konversi QMS ISO 9001:2015 BPOM	<i>Input :</i>				
			Dana	Rp	927.320.000	881.793.686	95,09
			<i>Output :</i>				
		Jumlah unit organisasi yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu QMS ISO 9001 BPOM secara konsisten	Jumlah unit organisasi yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu QMS ISO 9001 BPOM secara konsisten	Unit Organisasi	56	56	100,00
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan	Dokumen	24.060.222.000	22.347.689.654	96,40
			<i>Input :</i>				
		Penyusunan Grand Design Pengawasan Obat Dan Makanan	Dana	Rp	1.185.680.000	1.138.736.870	96,04
			<i>Output :</i>				
			Jumlah Draft KAK Penyusunan Grand Design Pengawasan Obat dan Makanan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100,00
		Review Rencana Strategis Tahun 2015-2019 di Lingkungan BPOM	<i>Input :</i>				
			Dana	Rp	1.057.199.000	986.821.936	93,34
			<i>Output :</i>				
		Jumlah Dokumen Review Rencana Strategis Tahun 2015-2019 di Lingkungan BPOM yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Review Rencana Strategis Tahun 2015-2019 di Lingkungan BPOM yang dihasilkan	Dokumen	3	3	100,00
			<i>Input :</i>				
			Dana	Rp	50.000.000	49.902.000	99,80
		Pemeliharaan Sarana Kantor Bagian Rencana Strategis dan Organisasi	<i>Output :</i>				
			Jumlah alat elektronik Bagian Renstra yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	unit	53	53	100,00

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Diseminasi Kebijakan Unit Eselon I	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	837.088.000	779.527.550	93,12
			<u>Output :</u>				
			Jumlah Dokumen Prosiding Diseminasi Kebijakan Unit Eselon I Tahun 2017	Dokumen	1	1	100,00
		Persiapan Musyawarah Nasional Pengawasan Obat & Makanan	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	1.498.350.000	1.495.195.200	99,79
			<u>Output :</u>				
			Jumlah Prosiding Rapat Kerja Nasional	Dokumen	1	1	100,00
		Diseminasi Kebijakan Baru Perencanaan Dan Penganggaran Pusat Dan Balai	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	685.565.000	680.941.000	99,33
			<u>Output :</u>				
		Internalisasi Kinerja Rorenceu	Jumlah Laporan Diseminasi Kebijakan Baru Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Balai	Laporan	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	635.140.000	620.783.240	97,74
		Pertemuan Penyusunan Anggaran RKP BPOM dan Bappenas	<u>Output :</u>				
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Internalisasi Rorenceu	Laporan	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	122.500.000	104.566.000	85,36
			<u>Output :</u>				
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (draft Perpres)	Dokumen	1	1	100,00

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Pertemuan Penyusunan Renja-KL BPOM dengan Bappenas	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	125.574.000	107.382.600	85,51
			<u>Output :</u>				
		Penyusunan Dokumen Trilateral Meeting	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan POM	Dokumen	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	308.970.000	200.007.950	64,73
		Diseminasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat Dan Balai	<u>Output :</u>				
			Jumlah Dokumen Trilateral Meeting	Dokumen	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
		Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL/TOR/Data Dukung dan Desk RKAKL Pagu Anggaran	Dana	Rp	1.159.082.000	1.153.725.000	99,54
			<u>Output :</u>				
			Jumlah Laporan Diseminasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Balai	Dokumen	1	1	100,00
		Pemantapan Mekanisme Perencanaan Dan Penganggaran Di BB/BPOM	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	1.257.330.000	1.241.740.000	98,76
			<u>Output :</u>				
		Jumlah Dokumen RKAKL/L Pagu Anggaran 2017 satker Pusat dan Balai	Jumlah Dokumen RKAKL/L Pagu Anggaran 2017 satker Pusat dan Balai	Dokumen	40	40	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	896.649.000	761.386.800	84,91
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemantapan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di BB/BPOM	<u>Output :</u>				
			Jumlah Laporan Kegiatan Pemantapan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di BB/BPOM	Laporan	64	44	68,75
			<u>Input :</u>				
			Dana				
			<u>Output :</u>				

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Pertemuan Koordinasi Program Dan Anggaran Dengan Lintas Sektor	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	142.402.000	123.783.000	86,93
			<u>Output :</u>				
		Sosialisasi Dan Bimtek RKAKL Alokasi Anggaran	Jumlah Laporan Koordinasi Program dan Anggaran dengan Lintas Sektor	Dokumen	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	1.466.400.000	1.463.471.000	99,80
		Pertemuan Rekonsiliasi Hibah/Perencanaan Dengan Stakeholder	<u>Output :</u>				
			Jumlah Dokumen Daftar Isian Anggaran (DIPA)/ Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan POM Tahun 2017	Dokumen	40	40	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	185.500.000	180.322.375	97,21
		Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Dengan Stakeholder	<u>Output :</u>				
			Laporan Rekonsiliasi Hibah	Laporan	2	2	100,00
			<u>Input :</u>				
		Monitoring Kegiatan PNB Di Balai Dalam Rangka Penyusunan Program PNB 2017	Dana	Rp	320.876.000	317.314.850	98,89
			<u>Output :</u>				
			Jumlah Dokumen Standar Biaya Keluaran	Dokumen	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	89.040.000	79.580.300	89,38
			<u>Output :</u>				
			Jumlah laporan hasil monitoring PNB di BB/ BPOM	Laporan	3	3	100,00

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Supervisi Perencanaan Bersama Instansi Terkait		<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	205.650.000	174.780.202	84,99
			<u>Output :</u>				
		Jumlah Laporan Supervisi Perencanaan Bersama Instansi Terkait		Laporan	22	22	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	268.780.000	267.534.000	99,54
	Pembahasan Lab Uji DNA		<u>Output :</u>				
			Jumlah laporan hasil pembahasan lab uji DNA	Laporan	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
		Penyusunan Juklak dan Juknis	Dana	Rp	270.600.000	263.349.500	97,32
			<u>Output :</u>				
			Jumlah Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Anggaran 2017 dan Petunjuk Teknis Kegiatan 2017	Dokumen	2	2	100,00
	Penyiapan Bahan dan Pengawalan RDP dengan Mitra Kerja BPOM		<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	190.780.000	176.375.900	92,45
			<u>Output :</u>				
		Jumlah Dokumen Materi Rapat Dengar Pendapat dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L		Dokumen	2	2	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	712.675.000	576.408.053	80,88
	Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran		<u>Output :</u>				
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran	Bulan	12	12	100,00
			<u>Input :</u>				
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	712.675.000	576.408.053	80,88

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Administrasi dan Pengelolaan Kegiatan	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	1.340.100.000	1.308.622.655	97,65
			Output :				
		Diklat Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Kegiatan Administrasi Pengelolaan Kegiatan	Bulan	12	12	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	127.154.000	126.815.000	99,73
		Evaluasi Kinerja Sektama	<u>Output :</u>				
			Jumlah Laporan Diklat Perencanaan dan Penganggaran	Laporan	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
		Perawatan Aplikasi dan Alat Elektronik Bagian PA	Dana	Rp	702.950.000	696.429.000	99,07
			Output :				
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Sektama	Dok	1	1	100,00
		Diklat Anggaran dan Perbendaharaan	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	93.830.000	81.573.000	86,94
			Output :				
			Jumlah alat elektronik Bagian PA yang dilakukan pemeliharaan dan perawatan	Unit	54	54	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	602.140.000	591.565.300	98,24
			<u>Output :</u>				
			Pelaksanaan dan sertifikat dari Kemenkeu untuk peserta unit/ satuan kerja BPOM	Paket	1	1	100,00

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Koordinasi, Evaluasi dan Verifikasi Tagihan Belanja Badan POM	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	611.340.000	566.873.376	92,73
			<u>Output :</u>				
		Pembinaan Dan Perbendaharaan Balai Besar/Balai POM	Jumlah pertemuan koordinasi dan evaluasi administrasi dan dokumen pertanggungjawaban	Paket	22	22	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	245.750.000	181.053.887	73,67
		Penatausahaan PNB	<u>Output :</u>				
			Jumlah BB/BPOM di monitoring terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan pelaksanaan anggaran	Balai	15	14	93,33
			<u>Input :</u>				
		Revisi Pedoman Pengelolaan PNB	Dana	Rp	1.280.900.000	1.243.160.925	97,05
			<u>Output :</u>				
			Sosialisasi PNB yang dilaksanakan	Paket	11	12	109,09
		Koordinasi Lintas Sektor Bagian Keuangan	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	147.120.000	118.819.826	80,76
			<u>Output :</u>				
		Koordinasi Lintas Sektor Bagian Keuangan	Pertemuan pembahasan pengkajian untuk pengembangan e-PNB	Paket	5	8	160,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	44.760.000	37.800.000	84,45
		Koordinasi Lintas Sektor Bagian Keuangan	<u>Output :</u>				
			Jumlah penugasan lintas sektor bagian keuangan	Paket	120	203	169,17
		Koordinasi Lintas Sektor Bagian Keuangan					

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Honor PNB	<u>Input :</u> Dana	Rp	1.234.560.000	960.910.000	77,83
			<u>Output :</u> Jumlah frekuensi honor PNB yang dibayarkan	Bulan	12	12	100,00
			<u>Input :</u> Dana	Rp	100.000.000	97.735.000	97,74
		Pemeliharaan Jaringan Bagian Keuangan	<u>Output :</u> Jaringan pengolah data dan aplikasi yang dipelihara selama tahun 2017	Paket	1	1	100,00
			<u>Input :</u> Dana	Rp	30.000.000	3.200.000	10,67
			<u>Output :</u> Pemeliharaan alat Elektronik yang dipelihara selama tahun 2017	Paket	1	1	100,00
		Pengadaan Alat Pengolah Data Rorenkeu	<u>Input :</u> Dana	Rp	615.678.000	603.797.903	98,07
			<u>Output :</u> Jumlah alat pengolah data yang tersedia untuk digunakan	unit	59	58	98,31
			<u>Input :</u> Dana	Rp	443.852.000	410.762.760	92,54
		Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan kegiatan Balai Besar/Balai POM	<u>Output :</u> Jumlah Laporan Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan kegiatan BB/BPOM	BB/BPOM	25	25	100,00
			<u>Input :</u> Dana	Rp	28.740.000	27.237.000	94,77
			<u>Output :</u> Jumlah draft Juklak dan Juknis Jabfung Perencana BPOM	Dokumen	2	2	100,00

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/RB	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	802.726.000	766.489.849	95,49
			<u>Output :</u>				
		Koordiasi Biro perencanaan dan keuangan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan	Dokumen	4	4	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	662.013.000	341.218.839	51,54
		Penyusunan LAPTAH Rorenkeu Tahun 2016	<u>Output :</u>				
			Jumlah Laporan Kegiatan Pembahasan Internal Rorenkeu	Dok	30	34	113,33
			<u>Input :</u>				
		Penyusunan LAPKIN Badan POM Tahun 2016	Dana	Rp	5.000.000	4.900.000	98,00
			<u>Output :</u>				
			Jumlah Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016	Dokumen	1	1	100,00
		Penyusunan LAPKIN Badan POM Tahun 2016	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	94.130.000	94.129.769	100,00
			<u>Output :</u>				
		Penyusunan LAPTAH Badan POM Tahun 2016	Jumlah laporan Kinerja Badan POM Tahun 2016	Dokumen	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	152.227.000	147.682.179	97,01
		Penyusunan LAPTAH Badan POM Tahun 2016	<u>Output :</u>				
			Jumlah Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2016	Dokumen	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
		Penyusunan LAPKIN Badan POM Tahun 2016	Dana	Rp	5.000.000	4.900.000	98,00
			<u>Output :</u>				
			Jumlah Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016	Dokumen	1	1	100,00

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Penyusunan LAPKIN Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	9.927.000	9.926.400	99,99
			<u>Output :</u>				
		Jumlah Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2016		Dokumen	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	18.263.000	18.156.759	99,42
		Jumlah laporan kinerja Sekretariat Utama Tahun 2016	<u>Output :</u>				
				Dokumen	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
		Peningkatan Kompetensi Dan ASN Rorenkeu	Dana	Rp	983.232.000	953.244.901	96,95
			<u>Output :</u>				
			Jumlah ASN yang ditingkat kompetensinya	Orang	64	64	100,00
		Pendataan Arsip dan Persuratan	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	277.236.000	272.886.000	98,43
			<u>Output :</u>				
		Jumlah Penataan Arsip dan Persuratan		Paket	1	1	100,00
			<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	7.775.000	7.775.000	100,00
		Jumlah Alat Studio dan Komunikasi	<u>Output :</u>				
				Unit	2	2	100,00
			<u>Input :</u>				
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Bagian Evapor	Dana	Rp	12.000.000	11.950.000	99,58
			<u>Output :</u>				
			Jumlah Peralatan dan Perkantoran	Paket	4	4	100,00

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
3	Tersusunnya Kajian Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Pengadaan Meubelair Rorenkeu	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	72.894.000	72.773.395	99,83
			<u>Output :</u>				
		Jumlah Meubelair Rorenkeu		Unit	36	36	100,00
			Jumlah Meubelair Rorenkeu				
			Jumlah Meubelair Rorenkeu				
		Jumlah Kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		1 Kajian	1.752.516.000	1.598.754.632	91,23
			Jumlah Kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi				
			Jumlah Kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi				
		Penataan dan Penguatan Organisasi	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	1.423.735.000	1.270.347.947	89,23
			<u>Output :</u>				
		Jumlah Kajian Penataan dan Penguatan Organisasi BPOM yang dihasilkan		Kajian	1	1	100,00
			Jumlah Kajian Penataan dan Penguatan Organisasi BPOM yang dihasilkan				
			Jumlah Kajian Penataan dan Penguatan Organisasi BPOM yang dihasilkan				
		Pertemuan Evaluasi UPT POM	<u>Input :</u>				
			Dana	Rp	328.781.000	328.406.685	99,89
			<u>Output :</u>				
		Jumlah laporan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang dihasilkan		Laporan	1	1	100,00
			Jumlah laporan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang dihasilkan				
			Jumlah laporan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang dihasilkan				

Lampiran 6

PENGUKURAN EFISIENSI SUB KEGIATAN

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2016

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rata-Rata % Capaian		IE	SE	KATEGORI	TE
				Input	Output				
1	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Badan POM								
		1	Pengembangan E-Performance	95,25	100,00	1,05	1,00	Efisien	0,05
		2	Sosialisasi dan bimtek SAKIP	99,98	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		3	Rapat Evaluasi Nasional di Gorontalo	99,21	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01
		4	Sosialisasi Akuntansi Berbasis Akrua Dan Kebijakan Akuntansi BPOM - Bendahara	94,56	100,00	1,06	1,00	Efisien	0,06
		5	Sosialisasi Akuntansi Berbasis Akrua Dan Kebijakan Akuntansi BPOM - Operator Persediaan	93,84	100,00	1,07	1,00	Efisien	0,07
		6	Monitoring Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	93,66	100,00	1,07	1,00	Efisien	0,07
		7	Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat Dan Balai)	97,28	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		8	FGD Dan Workshop Laporan Keuangan Badan POM	89,40	100,00	1,12	1,00	Efisien	0,12
		9	Unit Akuntansi Badan POM	82,07	100,00	1,22	1,00	Efisien	0,22
		10	Konsolidasi Laporan Keuangan Pusat Dan Balai	98,13	100,00	1,02	1,00	Efisien	0,02
		11	Review Sop Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan	73,91	100,00	1,35	1,00	Efisien	0,35
		12	Review Kebijakan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	70,98	100,00	1,41	1,00	Efisien	0,41
		13	Sosialisasi Akuntansi Berbasis Akrua Dan Kebijakan Akuntansi BPOM - PPK Dan Penyusun Laporan Keuangan	94,92	100,00	1,05	1,00	Efisien	0,05
		14	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan	81,32	100,00	1,23	1,00	Efisien	0,23

PENGUKURAN EFISIENSI SUB KEGIATAN

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2016

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rata-Rata % Capaian		IE	SE	KATEGORI	TE
				Input	Output				
2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi kegiatan yang terintegrasi	15	Pemeliharaan Dan Peningkatan QMS ISO 9001 BPOM	86,40	100,00	1,16	1,00	Efisien	0,16
		16	Surveilans Konversi QMS ISO 9001:2015 BPOM	95,09	100,00	1,05	1,00	Efisien	0,05
		1	Penyusunan <i>Grand Design</i> Pengawasan Obat dan Makanan	96,04	100,00	1,04	1,00	Efisien	0,04
		2	Review Rencana Strategis Tahun 2015-2019 di Lingkungan BPOM	93,34	100,00	1,07	1,00	Efisien	0,07
		3	Pemeliharaan Sarana Kantor Bagian Rencana Strategis dan Organisasi	99,80	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		4	Diseminasi Kebijakan Unit Eselon I	93,12	100,00	1,07	1,00	Efisien	0,07
		5	Persiapan Musyawarah Nasional Pengawasan Obat & Makanan	99,79	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		6	Diseminasi Kebijakan Baru Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Balai	99,33	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01
		7	Internalisasi Kinerja Rorence	97,74	100,00	1,02	1,00	Efisien	0,02
		8	Pertemuan Penyusunan Anggaran RKP Badan POM dan Bappenas	85,36	100,00	1,17	1,00	Efisien	0,17
		9	Pertemuan Penyusunan RENJA-KL Badan POM dengan Bappenas	85,51	100,00	1,17	1,00	Efisien	0,17
		10	Penyusunan Dokumen Trilateral Meeting	64,73	100,00	1,54	1,00	Efisien	0,54
		11	Diseminasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Balai	99,54	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00

PENGUKURAN EFISIENSI SUB KEGIATAN

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2016

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rata-Rata % Capaian		IE	SE	KATEGORI	TE
				Input	Output				
		12	Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL/TOR/Data Dukung dan Desk RKAKL Pagu Anggaran	98,76	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01
		13	Pemantapan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di BB/ BPOM	84,91	68,75	0,81	1,00	Tidak Efisien	-0,19
		14	Pertemuan Koordinasi Program dan Anggaran dengan Lintas Sektor	86,93	100,00	1,15	1,00	Efisien	0,15
		15	Sosialisasi dan Bimtek RKAKL Alokasi Anggaran	99,80	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		16	Pertemuan Rekonsiliasi Hibah/Perencanaan Dengan Stakeholder	97,21	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		17	Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan Stakeholder	98,89	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01
		18	Monitoring Kegiatan PNPB Di Balai Dalam Rangka Penyusunan Program PNPB 2017	89,38	100,00	1,12	1,00	Efisien	0,12
		19	Supervisi Perencanaan Bersama Instansi Terkait	84,99	100,00	1,18	1,00	Efisien	0,18
		20	Pembahasan Lab Uji DNA	99,54	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		21	Penyusunan Juklak dan Juknis	97,32	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		22	Penyediaan Bahan dan Pengawasan RDP dengan Mitra Kerja BPOM	92,45	100,00	1,08	1,00	Efisien	0,08
		23	Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran	80,88	100,00	1,24	1,00	Efisien	0,24
		24	Administrasi Pengelolaan Kegiatan	97,65	100,00	1,02	1,00	Efisien	0,02
		25	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	99,73	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		26	Evaluasi Kinerja Sektora	99,07	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01
		27	Perawatan Aplikasi dan Alat Elektronik Bagian PA	86,94	100,00	1,15	1,00	Efisien	0,15
		28	Diklat Anggaran dan Perbendaharaan	98,24	100,00	1,02	1,00	Efisien	0,02

PENGUKURAN EFISIENSI SUB KEGIATAN

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2016

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rata-Rata % Capaian		IE	SE	KATEGORI	TE
				Input	Output				
		29	Kordinasi, Evaluasi dan Verifikasi Tagihan Belanja Badan POM	92,73	100,00	1,08	1,00	Tidak Efisien	0,08
		30	Pembinaan dan Perbendaharaan Balai Besar/ Balai POM	73,67	93,33	1,27	1,00	Efisien	0,27
		31	Penatausahaan PNB	97,05	109,09	1,12	1,00	Tidak Efisien	0,12
		32	Revisi Pedoman Pengelolaan PNB	80,76	160,00	1,98	1,00	Tidak Efisien	0,98
		33	Kordinasi Lintas Sektor Bagian Keuangan	84,45	169,17	2,00	1,00	Efisien	1,00
		34	Honor PNB	77,83	100,00	1,28	1,00	Tidak Efisien	0,28
		35	Pemeliharaan Jaringan Bagian Keuangan	97,74	100,00	1,02	1,00	Efisien	0,02
		36	Pemeliharaan Alat Elektronik Bagian Keuangan	10,67	100,00	9,38	1,00	Efisien	8,38
		37	Pengadaan Alat Pengolah Data Rorence	98,07	98,31	1,00	1,00	Efisien	0,00
		38	Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Balai Besar/ Balai POM	92,54	100,00	1,08	1,00	Tidak Efisien	0,08
		39	Penyusunan Pedoman JFP	94,77	100,00	1,06	1,00	Efisien	0,06
		40	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Reformasi Birokrasi	95,49	100,00	1,05	1,00	Efisien	0,05
		41	Kordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan	51,54	113,33	2,20	1,00	Efisien	1,20
		42	Penyusunan LAPTAH Rorence TA 2016	98,00	100,00	1,02	1,00	Efisien	0,02
		43	Penyusunan LAPKIN Badan POM Tahun 2016	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		44	Penyusunan LAPTAH Badan POM Tahun 2016	97,01	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		45	Penyusunan LAPKIN Rorence Tahun 2016	99,99	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		46	Penyusunan LAPKIN Sekretariat Utama Tahun 2016	99,42	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01

PENGUKURAN EFISIENSI SUB KEGIATAN

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2016

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Kegiatan	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rata-Rata % Capaian		IE	SE	KATEGORI	TE
				Input	Output				
3		47	Peningkatan Kompetensi dan ASN Rorenkeu	96,95	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		48	Penataan Arsip dan Persuratan	98,43	100,00	1,02	1,00	Efisien	0,02
		49	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Bagian Evapor	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		50	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Bagian Evapor	99,58	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		51	Pengadaan Meubelair Rorenkeu	99,83	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
	Tersusunnya Kajian Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1	Penataan dan Penguatan Organisasi	89,23	100,00	1,12	1,00	Efisien	0,12
		2	Pertemuan Evaluasi UPT POM	99,89	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**
**Jl. Percetakan Negara No. 23 - Jakarta 10560
Indonesia**



@ halobpom@pom.go.id

www.pom.go.id

@bpom_ri

Bpom RI